

FORMAT SURAT PERMOHONAN
PERBAIKAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

<KOP SURAT>..... (1)	
Nomor :	(2) (5)
Hal :	(3)
Lampiran :	(4)
Yth.	(6)
.....	(7)
<p>Bersama ini kami mengajukan permohonan perbaikan transaksi penerimaan negara sebagaimana tersebut pada Daftar Rincian Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fotokopi SSP/SSPBB/SSB/SSPCP/SSSCP/SSPB/SSBP/STBS*) beserta NTPN/BPN *).2. Daftar Rincian Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara. <p>Demikian kami sampaikan untuk mendapat penyelesaian lebih lanjut.</p> <div><p>Kuasa Pengguna Anggaran/ Pimpinan Instansi,</p><p>(8)</p><p>..... (9)</p><p>..... (10)</p></div>	
*) Pilih salah satu	

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PERBAIKAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi dengan kop instansi berkenaan
(2)	Diisi dengan nomor surat
(3)	Diisi dengan perihal surat yaitu "Permohonan Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara"
(4)	Diisi dengan jumlah lampiran berkenaan
(5)	Diisi dengan tanggal pembuatan surat
(6)	Diisi dengan unit yang melakukan pencatatan dan pembukuan penerimaan negara pada SPAN yaitu Kepala KPPN.....atau Direktur Pengelolaan Kas Negara
(7)	Diisi dengan alamat KPPN/Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
(8)	Diisi dengan tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran
(9)	Diisi dengan Nama Lengkap Kuasa Pengguna Anggaran
(10)	Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran

DAFTAR RINCIAN PERBAIKAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

Perbaikan atas dokumen	<input type="checkbox"/> SSP	<input type="checkbox"/> SSPBB	<input type="checkbox"/> SSB	<input type="checkbox"/> SSPCP
	<input type="checkbox"/> SSCP	<input type="checkbox"/> SSBP	<input type="checkbox"/> SSPB	<input type="checkbox"/> STBS
Dokumen No.....	Tanggal Dok.....		Tanggal Setor.....	
Uraian				

Semula:

No	Segmen										Rp
	Satker	KPPN	Program	Output	Dana	Bank	Kewenangan	Lokasi	Anggaran	Antar Entitas	
Jumlah											

Menjadi:

No	Segmen										Rp
	Satker	KPPN	Program	Output	Dana	Bank	Kewenangan	Lokasi	Anggaran	Antar Entitas	
Jumlah											



DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

 MARWANTO HARJOWIRYONO